

# PRODUKSI PENGETAHUAN SEKSUALITAS PELAKU *FREE SEX* DI KALANGAN MILITER

(Studi Tentang Produksi Pengetahuan Seksualitas Institusi Militer “X” Di Malang)

Sonya Pramita\*

0510010047\*

\*Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang

Email : sonya.pramita@gmail.com

## ABSTRACT

**Introduction :** *This study discusses the production of sexuality knowledge of free sex actors in the military. The purpose of the study is to analyze the production of sexuality knowledge of free sex actors in the military and how the knowledge limits the disciplinary body of free sex actors in the military. Benefits of the research are as a study material in the realm of sociology, especially on issues of community development and the production of knowledge about sexuality that has power of his body that cannot be contained within the system of military power. This study uses the Michel Foucault theory to analyze the problem of knowledge production about sexuality that limits the disciplinary body of free sex actors in the military. According to Foucault, body can not be in repression by the knowledge and power that is run through the system in the military. The method that is used in this study is qualitative method using genealogy approach. Method : Genealogy is a method developed by Foucault to see the production of power, where the power is formed by differences in regulation, hierarchy is the form of regulation in military that is produced by knowledge that limits the body of free sex actors through a system of military members. Power production limits the body by producing knowledge formation and then generates power. Result : Results from this study is that the production of sexuality knowledge of free sex actors in the military has its function when the body that supposed to work efficiently and productively in repression by the system through military power which is hierarchical, then it is not compatible with the body's own productivity. When the body produces power mismatch then the body produces other discourse outside the power at that moment. According to Foucault, when the power is in the repression of the body, then the body has his own power that could produce another discourse through which knowledge which is formed from regulation. With the draft of free sex, then it is freeing military personnel to produce its own discourse outside the military system that applies in the legislation.*

*Keywords: Sex, Military, Discourse, Knowledge, and Power*

---

## Pendahuluan

Seks adalah hak asasi manusia. Setiap individu mempunyai hak atas alat kelaminnya. Tubuh dengan semua organ, atribut, fungsi, kondisi, dan inderanya tidak

banyak merupakan kondisi biologis, melainkan merupakan penciptaan sosial dengan kompleksitas yang luas dan hampir-hampir tak terbatas jenis, kekayaan, dan kekuasaannya (Synott, 2007:5). Hakikatnya individu bisa melakukan seks sesuai dengan kehendaknya dimanapun berada, kapanpun prosesnya, siapapun pasangannya. Seks merupakan kebutuhan dasar bagi individu itu sendiri. Seks sebagai urusan kelamin tak pernah kehabisan atau kehilangan daya sensasionalnya bagi siapa pun dan di zaman apapun, selalu ada saja perkembangan-perkembangan baru dalam fenomena seks sebuah masyarakat (Gunawan dan Suyono, 2003:3). Hasrat kebutuhan seks masuk dalam segala segi kehidupan baik itu adalah kasta atas dan kasta bawah, status sosial, profesi, usia, maupun pemuka agama, semua segi kehidupan tersebut tidak bisa beranjak dari seks yang *basicnya* adalah *kodrat* (red. sesuatu yang sudah digariskan oleh Tuhan sebagai bagian dari makhluk Tuhan yang tidak bisa dihindarkan sekalipun seorang pemuka agama) dari Tuhan. *Kodrat* tersebut tidak bisa dihindarkan dalam setiap individu, hanya bagaimana setiap individu tersebut dapat memanajemen hubungan seks tersebut. Menurut Foucault, wacana seks menjadi bagian strategi kekuasaan menghadapi penduduk supaya negara tahu akan seks dari warga negaranya dan apa yang dilakukan mereka dengan seks itu, tetapi setiap warga negara harus mampu mengontrol apa yang dilakukannya. Antara negara dan individu, seks menjadi pertarungan, dan pertarungan publik. Publik ikut serta dalam hubungan seks, diaturnya seks untuk membatasi hak asasi manusia lainnya. Seluruh bentuk wacana, pengetahuan, analisis, dan larangan ada di dalamnya (Haryatmoko, 2002:19).

Negara berperan serta dalam hubungan seks warganya. Seks dibatasi oleh kekuasaan negara melalui lembaga perkawinan. Masyarakat di kontrol dalam melakukan seks. Untuk menghindari pelanggaran hak-hak individu yang lain, maka dibuatlah sebuah legalitas perkawinan yang sebagaian tertaut dari norma agama. Peran serta negara dalam hal kekuasaan atas seks warganya dibatasi legalitas yang berkelanjutan pada kepentingan formalitas negara tersebut, salah satu contohnya adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk), kartu ini bagian dari seks dan kekuasaan, di dalamnya memuat jenis kelamin dan status perkawinan. Seks tidak hanya memiliki akses ke kehidupan tubuh yang harus dikoreksi, tetapi juga akses pada kehidupan spesies yang ingin dikontrolnya (Haryatmoko, 2002:21). Legalitas tersebut digunakan negara untuk mengontrol hubungan warganya dalam bersosialisasi dengan individu yang lain. Kekuasaan akan seks dalam tanda pengenal tersebut untuk mengetahui eksistensi warga negara dalam seks melalui jenis kelamin dan status perkawinan. Ketika seks dibatasi oleh kekuasaan dari negara tidak serta merta hal-hal yang berkaitan dengan seks akan berjalan ke arah positif sesuai dengan alur yang diterapkan negara dalam mengatur sebuah perkawinan untuk melegalkan seks. Foucault mengemukakan moralitas atau etika lahir dari refleksi tentang seksualitas, keinginan serta kenikmatan (Kebung, 2002:39). Keseimbangan dalam seksualitas, keinginan serta kenikmatan diperlukan sejalan dengan adanya lingkup masyarakat dalam pengambilan keputusan penilaian terhadap individu lain dalam menyikapi seks. Seks dalam kekuasaan yang dilakukan oleh negara di sisi lain, masih ada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan aturan atas hubungan seks yang diterapkan oleh negara salah satunya adalah kalangan militer.

Dalam kalangan militer seks diatur oleh negara, aturan tersebut bersifat tertulis dan harus berada dalam ikatan perkawinan dibawah lembaga perkawinan yang sah. Perkawinan yang dilakukan oleh individu bagian dari militer harus ada persetujuan dari

panglima. Perkawinan tersebut juga dilakukan di kantor agar diakui oleh negara meskipun telah melakukan perkawinan di KUA atau catatan sipil. Hal tersebut berkaitan dengan gaji yang diperoleh ataupun tunjangan untuk istri dan anak pada anggota militer. Kerap kali ada paradoksal dan pencerapan hitam putih terhadap sifat dan bentuk seks. Seks yang dilakukan melalui lembaga perkawinan adalah benar dan baik, sebaliknya yang dilakukan misalnya dengan pelacur sebagai kotor dan bejat (Ihsan, 2006:245). Paradoksal sifat dan bentuk seks ini merupakan bagian wacana seks menjadi bagian strategi kekuasaan menghadapi penduduknya. Konstruksi sosial tersebut tidak bisa dihindarkan dalam hidup bermasyarakat. Dengan adanya bentuk seks dan kekuasaan dalam militer, anggotanya dikendalikan oleh negara, sehingga seks diatur oleh kekuasaan yang dimiliki oleh militer, dimana dalam melegalkan seks anggota militer diharuskan untuk melaporkan hal tersebut kepada kesatuannya atau kepada komandan. Meskipun demikian hal tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, bahwa seks tidak sepenuhnya diatur oleh negara, karena anggota militer pun masih bisa melakukan *free sex*. Fenomena seks-pranikah bisa dibaca sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan norma. Analisis strategi kekuasaan merupakan pra-andaian keinginan untuk tahu membawa Foucault berbicara tentang mekanisme seksualitas, mekanisme seksualitas mempunyai *raison d'être*-nya (kecenderungan) bukan untuk memproduksi, tetapi untuk berkembang, inovasi, menganeksi, menemukan, dan menembus tubuh dengan semakin mendetail dan mengontrol penduduk secara semakin global (Haryatmoko, 2002:20).

Seks dalam kekuasaan mengontrol bagian lain dari negara yaitu individu dari kalangan militer, karena semakin ketat suatu peraturan, masih ada celah untuk melanggar dengan adanya seks dan kekuasaan melalui wacana diluar kotrol yang menguasai. Kuatnya kekuasaan akan seks maka semakin kuat juga pelanggaran yang dilakukan oleh pelakunya. Kekuasaan akan seks dibentuk atas peraturan yang harus ditaati oleh pelakunya dari struktur yang menaungi, jika melanggar peraturan yang ditetapkan maka mendapatkan sanksi yang telah diatur. Dengan adanya peraturan ini, maka di sisi lain maka semakin munculnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik itu diketahui oleh struktur tersebut maupun disimpan rapi oleh pelakunya. Produksi pengetahuan berkembang sejalan dengan pengetahuan tentang akan seks yang kalangan militer dapatkan. Pengetahuan akan *free sex* dalam kalangan militer tidak berhenti pada satu individu saja hal itu akan terus berkembang dari senior ke junior antar teman sesama militer, seks tidak hanya menjadi kalangan terbatas, berikut juga adanya produksi pengetahuan akan seks itu sendiri yang terus menerus diungkap tidak lagi bungkam. Ketidaksiapan mental yang dimiliki oleh pelaku *free sex*, maka pelaku memilih wacana lain diluar sistem yang berlaku di militer. Disini hal ini menjadi menarik, karena meraka bagian dari penegak hukum. Militer merupakan bagian dari penegak hukum karena tugas mereka yang menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan nasional. Disinilah ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana produksi pengetahuan seksualitas bagi pelaku *free sex* yang berprofesi sebagai militer di Malang. Hal ini juga tidak lepas dari seks dan kuasa yang diberlakukan oleh negara untuk warga negaranya, yang lebih menitikberatkan pada pengetahuan kuasa militer dengan peraturan yang dimiliki lebih terstruktur.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel. Penggunaan pendekatan kualitatif ini sesuai dengan teori yang digunakan peneliti yakni hubungan kekuasaan dengan pengetahuan Michel Foucault. Genealogi yang dikembangkan oleh Foucault ini memfokuskan pada hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Kekuasaan dan pengetahuan sendiri saling terkait, dimana tidak ada hubungan kekuasaan tanpa pembentukan yang terkait dengan pengetahuan. Hal pertama dari tugas genealogi Foucault adalah menemukan awal-awal dari sebuah pengetahuan dan bagaimana semua itu terbentuk dalam menjawab semua kebutuhan, bagaimana dimodifikasi dan diganti, membatasi secara efektif yang digunakan, serta seluas apa semua itu diterapkan (Ritzer, 2003:80). Hal kedua genealogi adalah memeriksa bagaimana rangkaian pengetahuan dibentuk, apa yang menjadi norma tertentu masing-masing, dan bagaimana sebuah kondisi muncul dan tumbuh dengan variasinya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan genealogi karena peneliti hendak mengetahui hubungan pengetahuan dengan kekuasaan. Metode ini memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang memahami pengetahuan individu secara personal dan melihat bagaimana pengetahuan itu terbentuk oleh berbagai kekuasaan. Disini peneliti lebih memfokuskan diri pada genealogi pelaku *free sex* di kalangan militer memperoleh pengetahuannya seksualitas. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang merupakan Kota Kesatrian, di Malang banyak didirikan tempat pelatihan militer, asrama, mess perwira, dan pabrik amunisi, senjata, dan kendaraan tempur. Hal ini didasarkan pada penemuan realitas yang unik, keunikannya terdapat pada fenomena terpendam dimana di dalam kawasan militer terdapat pelaku *free sex*, hal tersebut menarik, karena merupakan pelanggaran terhadap peraturan dalam instansi yang diberlakukan. Untuk mendapatkan data yang diinginkan peneliti bertemu langsung dengan komandan kompi dilanjutkan dengan wawancara mendalam terhadap informan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh beberapa informan yang mewakili. Informan yang dipilih telah dikategorikan sesuai dengan kategori informan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan ciri-ciri atau kriteria tertentu (*purposive*). Penentuan informan pertama melalui *key informan* yaitu Serka JC, informan selanjutnya dipilih menggunakan teknik bola salju untuk memperoleh variasi sebanyak-banyaknya. Melalui teknik ini, diperoleh 5 informan diantaranya 1 informan kunci, 2 informan utama, dan 2 informan pendukung, telah diperoleh kebulatan atau kesamaan informasi. Informan yang diperoleh telah dapat memperluas informasi dapat dipertentangkan sehingga adanya kesenjangan informasi yang ditemui sudah dapat tertutupi.

## Hasil dan Pembahasan

- **Produksi Pengetahuan Seksualitas Pelaku *Free Sex* di Kalangan Militer**

Dalam militer terdapat regulasi yang merupakan sistem mengkoordinasi segala aktivitas tubuh, untuk keberlangsungan hidup anggotanya yang berada dalam militer. Sistem ini merupakan koordinasi yang mengatur agar semua sistem tubuh dapat bekerja secara serasi, dimana sistem ini memiliki peranan penting dalam militer yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata pertahanan keamanan Negara. Regulasi menghasilkan serangkaian pengetahuan yang menggerakkan hidup anggota militer. Pengetahuan menghasilkan jarak dan perbedaan dalam kehidupan militer, kemudian membentuk kuasa. Adanya panglima-prajurit, senior-junior maka di dalamnya kuasa sedang bekerja. Berikut juga sebaliknya kuasa merangsang lahirnya pengetahuan baru, kuasa-pengetahuan saling berfungsi salah satunya tidak bisa dipisahkan. Dengan adanya kuasa maka di dalam militer tubuh anggotanya diatur dalam sistem agar dapat tunduk dengan sistem. Sistem mengatur tubuh anggota agar dapat bekerja secara produktif. Seks masuk dalam sistem tersebut, diatur dalam UU RI No. 34 Tahun 2004, Pasal 63. Dimana seks anggota militer yang sesuai dengan sistem kuasa harus dilakukan di dalam ikatan perkawinan dengan persetujuan panglima. Seks diatur secara produktif karena anggota militer menyangkut pada administrasi yang diatur Negara.

Seksualitas dalam kerangka hasrat, tidak akan membebaskan manusia dari kuasa, ketika tubuh di represi maka tubuh mencari wacana diluar sistem militer, karena menurut sudut pandang Foucault tubuh tidak bisa di represi, ketika tubuh di represi maka tubuh mencari wacana lain diluar sistem, dimana manusia yang melakukan produksi pengetahuan yang menghasilkan atau menciptakan wacana baru diluar sistem yang merepresi tubuhnya. Wacana tersebut adalah *free sex*, seks bebas, seks yang dilakukan tanpa sistem militer, tanpa kuasa militer, tetapi para pelaku *free sex* ini masih berada dalam kuasa militer, tidak menghancurkan kuasa militer, tetapi menghasilkan wacana *free sex* yang beroperasi secara positif dan produktif untuk tubuhnya tidak bersifat represif. Wacana *free sex* di militer tidak lepas dari kuasa hirarki yang ada di dalam sistem militer ketika *free sex* tersebut diproduksi melalui kuasa-kuasa yang memiliki regulasi yang mengedalikan hidup manusia dari adanya jarak dan perbedaan. Produksi pengetahuan seksualitas menghasilkan wacana-wacana baru bagi pelaku *free sex* di militer.

Militer merupakan angkatan bersenjata dalam suatu negara yang berkewajiban menjaga stabilitas pertahanan keamanan suatu negara. Di Militer lingkungan tugasnya lebih utama di medan perang, militer memang dilatih dan dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin. Di kehidupan militer memang dituntut adanya hirarki yang jelas, para atasan harus mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah pasukan bersenjata. Dalam militer terdapat regulasi yang ditandai dengan norma, pengetahuan, kehidupan makna, disiplin, dan peraturan. Regulasi dalam militer bersifat mengikat setiap anggota militer, dari panglima sampai dengan prajuritnya. Regulasi bersifat mengikat karena di militer merupakan pasukan bersenjata dimana diperlukan tanggung jawab dalam koordinasi tubuh dan sistem agar bertanggung jawab dalam penggunaan wewenangnya.

Pengetahuan dihasilkan dari adanya regulasi, dengan adanya regulasi pengetahuan di dalam militer terbentuk. Pengetahuan dalam militer yang dituntut adanya hirarki yang

jelas antara panglima-prajurit dalam bentuk pangkat. Dimana pangkat yang diatas yang memegang kendali kuasa atas pangkat dibawahnya, agar para atasan mampu mengkoordinasi bawahannya. Dengan adanya hirarkhi ini maka produksi kuasa sedang berlangsung, dimana adanya jarak dan perbedaan dalam kehidupan militer maka membentuk kuasa. Kuasa dalam militer menyakut dalam setiap kehidupan yang berlangsung di militer, dan kuasa tersebut juga memasuki ranah disiplin tubuh. Tubuh anggota militer dikendalikan oleh kuasa, agar dapat tunduk dan produktif. Kuasa dalam militer dibentuk dalam sistem perundang-undangan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHP) Pasal 46 Ayat 2 : Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk pada tata tertib militer. Pada Pasal 46 Ayat 2 undang-undang tersebut tubuh ditundukkan oleh pengetahuan yang dimiliki militer. Pengetahuan tersebut menghasilkan kuasa terhadap tubuh merupakan bagian dari politik anatomi terhadap tubuh manusia. Menurut Foucault, pengetahuan dan penguasaan ini membentuk apa yang disebut sebagai teknologi politis terhadap tubuh (*the political technology of body*) (Foucault dalam Santoso, 2007:179). Dalam UU tersebut bersifat mutlak, tidak ada pengecualian, untuk setiap hal-hal yang berkaitan dengan anggota militer, terdapat dalam undang-undang tertulis yang mengatur setiap kehidupan dalam militer. Sistem ini kemudian masuk dalam ranah privasi anggota militer, yaitu seks. Dalam UU yang berlaku di militer seks diatur dalam Undang-undang, undang-undang yang berlaku di militer juga menyangkut pada disiplin tubuh, salah satunya pengaturan perkawinan, ada dalam Undang-Undang TNI RI no. 34 Tahun 2004 Pasal 63.

Dalam peraturan tersebut berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia 63 Ayat 1 dan 2 yang berisi, Ayat (1) : Perkawinan - perceraian dan rujuk bagi setiap prajurit dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Ayat (2) : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima. Peraturan tersebut bersifat memaksa untuk semua anggota militer yang berada di Republik Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut maka aktifitas seks yang merupakan hak tubuh diatur oleh sistem, agar dapat produktif dan patuh tunduk dengan keputusan Panglima sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di militer. Tujuan kuasa disiplin ini adalah membentuk suatu tubuh patuh dan dapat ditundukkan, dimanfaatkan, ditransformasikan, diperbaiki, dan dapat ditingkatkan gunanya (Foucault dalam Santoso, 2007:183). Tubuh yang patuh ini juga menjadi produktif dan disiplin terhadap institusi. Tujuan kuasa disiplin terhadap tubuh bahwa Negara khususnya institusi militer dapat mengendalikan anggotanya dalam proses politik-anatomi. Tubuh dalam militer direpresi, merupakan bagian dari tatanan yang diberlakukan oleh Negara. Negara ingin mengetahui aktifitas seks para punggawa militer yang notabene memegang stabilitas pertahanan keamanan nasional. Seks diatur oleh sistem militer agar bio-politik terhadap kontrol populasi terkendali oleh Negara, dimana biaya hidup anggota militer ditanggung oleh Negara sampai dengan tunjangan suami-istri dan anak-anaknya.

Wacana seks dalam militer merupakan bagian dari produksi pengetahuan kedalam kuasa untuk kendali tubuh anggota militer. Wacana ini tentunya melahirkan wacana baru, dimana tubuh tidak bisa direpresi. Menurut Foucault kuasa dan pengetahuan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, kuasa menemukan bentuknya dalam pengetahuan (Haryatmoko, 2003: 225). Ketika tubuh direpresi dengan kuasa maka

tubuh melakukan reproduksi, regulasi, dan produksi wacana lain diluar sistem yang tidak merepresi produktifitasnya.

Tubuh tetap tidak bisa direpresi dengan sistem, mereka mencari wacana lain diluar sistem yang berlaku dalam undang-undang yang hanya mengikat dibatas kuasa namun tubuh tetap menandai dirinya dengan kebebasannya dalam seksualitas. Dalam isolasi terhadap tubuh tersebut maka ada sebuah pengetahuan dari tubuh yang secara tepat bukanlah ilmu tentang cara berfungsinya, dan penguasaan atas kekuatannya, namun lebih daripada kemampuannya untuk menaklukkan mereka (Foucault dalam Santoso, 2007:179).

Salah satu kuasa militer yang menghasilkan wacana lain bagi anggota militer adalah adanya wacana perilaku seksual diluar ikatan perkawinan merupakan wacana yang diciptakan dari dominasi Undang-Undang TNI RI no. 34 Tahun 2004 Pasal 63. Wacana ini dibentuk dengan adanya pengetahuan diluar sistem. Ketika tubuh produktif dan sistem yang berlaku mendominasi tubuh, maka tubuh yang tidak bisa direpresi melakukan perlawanan dengan mencari pengetahuan lain diluar sistem yang mendominasinya. Tubuh kemudian membentuk wacana baru tentang seks. Wacana baru tentang seks, adalah *free sex*, merupakan dari kata seks bebas, seks yang tidak terikat, seks yang bisa dilakukan setiap manusia atas kuasa terhadap tubuhnya sendiri yang tidak direpresi. Wacana *free sex* merupakan wacana di luar sistem militer, wacana ini di produksi oleh anggota militer ketika tubuhnya yang produktif memiliki kuasa untuk melakukan aktifitas seks.

- **Relasi Kuasa Atas Seksualitas Kalangan Militer**

Masyarakat seksualitas ditandai dengan norma, pengetahuan, kehidupan, makna, disiplin dan peraturan. Kuasa bagi Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu, subjek yang lebih kecil. Strategi kekuasaan bisa berlangsung dimana-mana. Dimana terdapat susunan aturan-aturan, sistem-sistem yang terdapat regulasi. Dimana ada manusia yang memiliki hubungan tertentu satu sama lain di dunia, disitu kuasa sedang berfungsi. Kuasa dan pengetahuan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan (Haryatmoko, 2003: 225). Kuasa menemukan bentuknya dalam pengetahuan. Kuasa memproduksi pengetahuan dan bukan saja karena pengetahuan berguna bagi kuasa, sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Karena setiap kekuasaan disusun, ditepatkan, dan diwujudkan lewat pengetahuan yang menghasilkan wacana tertentu, bahkan dalam kuasa terbentuk relasi-relasi kuasa dengan tidak adanya dominasi.

Wacana tertentu menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang menimbulkan efek kuasa. Kebenaran bagi Foucault tidak dipahami sebagai sesuatu yang datang begitu saja, bukan juga sebuah konsep, akan tetapi kebenaran diproduksi dalam setiap kekuasaan. Kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenarannya sendiri. Kuasa menghasilkan kebenaran tertentu disebarkan melalui wacana dan dibentuk oleh kekuasaan. Produksi pengetahuan seksualitas di kalangan militer berguna bagi kuasa karena di dalamnya terdapat sistem disiplin tubuh. Tidak ada kuasa yang dimiliki oleh senior tanpa pengetahuan seksualitas yang diproduksi tanpa adanya kebenaran, kuasa yang dimiliki oleh senior melahirkan pengetahuan baru. Kekuasaan senioritas dalam militer membentuk adanya wacana. Adanya jarak dan perbedaan dalam kehidupan,

membentuk kekuasaan, adanya identitas senior dan junior yang dapat melahirkan kekuasaan. Kuasa tersebut dapat berlangsung dan produktif karena adanya senior dan junior dalam militer terus menerus berlangsung. Produksi pengetahuan dari senior ke junior, atau dari komandan ke bawahan (prajurit) merupakan bagian dari wacana.

Kuasa senior-junior, komandan-bawahan dilahirkan dari sistem yang sejak awal dibentuk oleh militer dimana dalam kehidupan sehari-hari yang berada pada kedudukan dibawahnya menurut dengan yang berada di kedudukan atasnya. Hal tersebut tercermin dari undang-undang yang ada dalam militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Pasal 46 Ayat 2 : Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk pada tata tertib militer. Dalam UU tersebut bersifat mutlak, tidak ada pengecualian untuk hal-hal yang berkaitan dengan anggota militer ada Undang-Undang tertulis yang mengatur aktifitas tentara.

Undang-undang yang berlaku dalam militer juga menyangkut pada disiplin tubuh, salah satunya pengaturan perkawinan, ada dalam Undang-Undang TNI RI no. 34 Tahun 2004 Pasal 63. Dalam UU tersebut mengatur tubuh dan aktifitas seksual para anggota militer tidak terkecuali masuk dalam Undang-Undang, sehingga kuasa yang diatur dalam institusi, secara tidak langsung menghasilkan wacana baru dimana ketika tubuh tidak dapat tunduk oleh sistem tersebut, maka tubuh yang tidak bisa direpresi meskipun sebagai anggota militer mencari pengetahuan lain diluar UU yang berlaku dan menghasilkan wacana baru.

Berbicara tentang produksi pengetahuan seksualitas pelaku *free sex* di kalangan militer berarti harus menempatkan dalam kerangka relasi-relasi kekuasaan : antara *free sex*-seks di dalam ikatan perkawinan, antara panglima-prajurit, antara senior-junior, antara tubuh tunduk-tubuh produktif. Fenomena *free sex* bisa dibaca sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan militer. Negara, komandan, dan undang-undang membentuk kekuasaan militer. Pelanggaran undang-undang yang berlaku pada sistem merupakan protes terhadap regulasi yang diterapkan kuasa militer. Keingintahuan akan *free sex* menjadi wacana perlawanan wacana militer, menurut Foucault berbicara tentang mekanisme seksualitas, mekanisme seksualitas mempunyai *raison d'être*-nya (kecenderungan) bukan untuk memproduksi, tetapi untuk berkembang, inovasi, menganeksi, menemukan, dan menembus tubuh dengan semakin mendetail dan mengontrol penduduk secara semakin global (Haryatmoko, 2002:20).

- **Review Paradoks Wacana Militer**

Wacana seksualitas tidak bisa dikelompokkan antara wacana yang diterima dan yang ditolak atau diantara wacana yang mendominasi dan yang didominasi tetapi bayangkan wacana sebagai unsur-unsur nalar dengan beragam strategi. Seksualitas bukanlah bentuk perlawanan terhadap kekuasaan dan jangan pula berusaha menundukan seksualitas karena sewajarnya seks itu ada dan selalu terus ada. Seksualitas lebih menyerupai saluran yang padat bagi hubungan kekuasaan

Pengetahuan dibentuk dari regulasi yang dimiliki individu, dengan adanya jarak dan perbedaan dalam kehidupan maka pengetahuan tersebut membentuk kuasa. Tubuh memiliki kuasa atas produktifnya, tubuh dapat pula tunduk pada sistem yang berlaku untuk melaksanakan bio-politik terhadap kontrol populasi yang dikendalikan. Namun tubuh tidak bisa direpresi karena tubuh akan mencari wacana yang tidak merepresi produktifitasnya. Tubuh tidak dapat direpresi, ketika tubuh direpresi dalam suatu sistem, maka tubuh mencari pengetahuan yang lain, dimana tubuh bersifat produktif.

## Kesimpulan

Produksi pengetahuan seksualitas pelaku *free sex* di kalangan militer dapat berfungsi ketika tubuh yang seharusnya bekerja secara efisien dan produktif di represi oleh sistem melalui kuasa yang tidak sesuai dengan produktifitas tubuh itu sendiri. Ketika ketidaksesuaian kuasa maka tubuh memproduksi wacana lain atau mencari wacana lain diluar kuasa yang dijalankan pada saat itu. Menurut Foucault kuasa tubuh tidak bisa direpresi, tubuh memiliki kuasanya sendiri yang bisa diproduksi melalui pengetahuan yang dimiliki yang dibentuk dari regulasi.

### 1. Produksi Pengetahuan Seksualitas Pelaku *Free Sex* di Kalangan Militer

Produksi pengetahuan seksualitas pelaku *free sex* di kalangan militer tidak lepas dari sistem yang diberlakukan pada militer. Wacana *free sex* merupakan realisasi wacana ketika tubuh direpresi dengan sistem yang dihasilkan oleh militer. Produksi pengetahuan *free sex* merupakan wacana ketidaksiapan para pelaku *free sex* di kalangan militer dalam menjalankan UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang aturan pelaksanaan perkawinan. Dalam wacana *free sex* melahirkan wacana-wacana yang melatarbelakangi lahirnya wacana *free sex*. Wacana tersebut umumnya diproduksi dari sistem perundang-undangan yang berlaku di militer. Dari peraturan yang mengharuskan untuk perkawinan dilakukan melalui aturan dengan persetujuan panglima, peraturan tidak diperbolehkannya anggota PKI menjadi bagian dari militer, dan peraturan yang mewajibkan mendaftar sebagai anggota militer harus berstatus single. Wacana-wacana tersebut memproduksi wacana-wacana yang *free sex* dan tidak menghancurkan wacana sistem militer, wacana-wacana tersebut berjalan beriringan dalam kehidupan individu pelaku *free sex* di kalangan militer.

### 2. Relasi Kuasa Atas Seksualitas di Kalangan Militer

Di dalam militer aktifitas seksual diatur dalam sistem, sistem yang terdapat dalam UU RI No. 34 Tahun 2004 Pasal 63, Ayat (1) Perkawinan yang dilakukan oleh anggota militer harus sesuai dengan perundang-undangan, Ayat (2) Perkawinan harus melalui persetujuan Panglima. Persetujuan Panglima merupakan bagian dari relasi kuasa, sistem hirarki tidak dapat lepas dalam aktifitas seksual anggota militer. Ketika wacana *free sex* diproduksi, darimana wacana tersebut di dapat maka disitu terdapat kuasa. Ketika wacana *free sex* diproduksi melalui komandan atau senior, maka ketika melakukan perilaku *free sex* tidak lepas dari sistem hirarki dimana peraturan dari komandan atau senior secara langsung masuk dalam sistem wacana *free sex* tersebut, komandan senior memiliki kuasa atas tubuh-tubuh yang dikuasai atas wacana *free sex* yang mereka produksi.

### 3. Review Paradoks Wacana Militer

Wacana *free sex* tidak lepas dari produksi pengetahuan tentang *free sex*, baik dari senior ataupun dari diri sendiri sebagai pemiliki kuasa tubuh. Menjadi bagian dari anggota militer, para anggota paham akan undang-undang yang berlaku dari tegaknya sistem peraturan dalam militer, pemahaman mereka tidak hanya sebatas pengetahuan tentang sistem undang-undang. Pemahaman mereka pada umumnya dipengaruhi dengan adanya represi tubuh, ketika tubuh di represi maka tubuh mencari wacana lain. Pembentukan wacana *free sex* sesungguhnya beroperasi secara positif dan produktif, dimana ketika tubuh tidak di represi maka disitu tubuh beroperasi secara produktif, sehingga wacana militer menjadi sistem yang dipatuhi oleh tubuh anggota militer diluar wacana seks, ketika dihadapkan dengan wacana seksualitas maka anggota militer melaksanakan wacana *free sex*.

Tubuh dapat menjadi produktif hanya mungkin bila mereka terperangkap dalam sebuah sistem represi, tubuh menjadi sesuatu kekuatan yang berguna ketika tubuh yang ditundukkan oleh kuasa. Tubuh mencari kuasa dan wacana diluar represi yang sebelumnya mereka ditundukkan oleh kuasa militer. Ketika tubuh menemukan kuasa wacana *free sex*, maka tubuh tetap berada dalam kuasa militer sehingga pelaku *free sex* di kalangan militer dalam menjalankan dualisme sistem yang sesuai dengan kuasa tubuhnya menginginkan wacana mana yang sedang berfungsi wacana militer atau wacana *free sex*. Selama kedua wacana tersebut dijalankan sesuai dengan sistem masing-masing maka kedua wacana tersebut berjalan secara beriringan sesuai dengan fungsi kuasa tubuh para pelaku *free sex* di kalangan militer.

## Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. 2003. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bungin, Prof. Dr. H. M. Burhan, S.Sos. *Pornomedia, Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, dan Perayaan Seks di Media Massa*. 2005. Prenada Media. Jakarta.
- Foucault, Michel. *La Volonté de Savoir (Histoire de la Sexualité)*. Judul terjemahan : *Ingin Tahu : Sejarah Seksualitas*. Alih Bahasa oleh Rahayu S. Hidayat. 2008. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Giddens, Anthony. *Transformation of Intimacy : Seksualitas, Cinta, dan Erotisme Dalam Masyarakat Modern*. 2004. Fresh Book. Jakarta.
- Gunawan, FX Rudy & Seno Joko Suyono. *Wild Reality : Refleksi Kelamin & Sejarah Pornografi*. 2003. Gagas Media. Jakarta.
- Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan*. 2003. Kompas. Jakarta.
- Ihsan, Soffa. *In The Name Of Sex : Santri, Dunia Kelamin, dan Kitab Kuning*. 2004. JP Books. Surabaya.
- Ihsan, Soffa. *The End Of Marriage And The Last Sex : Pudarnya Perkawinan Dan Pesona Seks Atas Nama Cinta*. 2006. JP Books. Surabaya.

K.Yin, Prof Dr. Robert. *Genealogi : Desain & Metode*. 2002. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Kuswarno, Prof. Dr. Engkus. *Fenomenologi : Konsepsi, Pedoman, Dan Contoh Penelitian*. 2009. Widya Padjadjaran. Bandung.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi*. 1992. UI Press. Jakarta.

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2005. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung

Ritzer, George. *Teori Sosial Postmodern*. 2004. Kreasi Wacana. Yogyakarta.

Rusantiningtiyas, Paulina Raras. *Cinta, Seks & Aborsi : Kisah Seksualitas Orang Muda*. 2008. KSGK Ubaya. Surabaya.

Salim, Agus. *Teori Paradigma Penelitian Sosial*. 2006. Tiara Wacana. Yogyakarta.

Santoso, Listiyono dkk. *Epistemologi Kiri*. 2007. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.

Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*. 2011. Rajawali Press. Jakarta.

Sudarma, Momon. *Sosiologi Untuk Kesehatan*. 2008. Salemba Medika. Jakarta.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. 2005. Alfabeta. Bandung.

Sulista DKK. *Terjemahan Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial, Judul Asli : Social Sciense Research Method : Bruce A. Chadwick, Howard M. Bahr, Stan L. Alberch*. 1991. Brigham Young University. New Jersey.

Synnott, Anthony. *Tubuh Sosial : Simbolisme, Diri, dan Masyarakat*. 2007. Jalasutra. Yogyakarta.

White, Kevin. *Pengantar Sosiologi Kesehatan dan Penyakit Edisi Ketiga*. 2011. Rajawali Press. Jakarta.

### **Majalah :**

Adian, Donny Gahral. *Basis : Menabur Kuasa Menuai Wacana*. 2002. Kanisius. Yogyakarta.

Haryatmoko. *Basis : Kekuasaan Melahirkan Anti-Kekuasaan Edisi Foucault & Marx*. 2002. Kanisius. Yogyakarta.

Kebung, Konrad. *Basis : Kembalinya Moral Melalui Seks*. 2002. Kanisius. Yogyakarta.

Sugiharto, I Bambang. *Basis : Foucault dan Postmodernisme*. 2002. Kanisius. Yogyakarta.

..... Kalam : Jurnal Kebudayaan. 2000. Yayasan Kalam. Jakarta.

### **Internet :**

Anonim. *Apa Itu Seks?* dalam <http://PeSSek.com>. Diakses tanggal 7 Agustus 2012 pukul 02.45.

Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia* dalam <http://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 24 Januari 2013 pukul 11.02.

Anonim. *Mendesak Pembangunan Selatan Lintas Jatim*. Kompas, Jumat 17 April 2009 dalam [www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses hari Rabu, 29 April 2009 pukul 20.30

Selamihardja, Nanny dan I Gede Agung Yudana. *Remaja dan Hubungan Seksual Pranikah*. 10 Oktober 2007 dalam [www.pusatartikel.com](http://www.pusatartikel.com). Diakses tanggal : 12 Januari 2009.

Zahidayah. *Mungkinkah Urbanisasi Bermanfaat*. 2006 dalam <http://zahidayat.blogdetik.com>. Diakses tanggal 13 Februari 2009 pukul 12.45